

**EVALUASI KEBIJAKAN
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN
DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG**
(Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

SILVIANA

NPM 22101091046



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Silviana, 22101091046, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, **“Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun di Kecamatan Kedungkandang (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang)”**, Dosen Pembimbing 1: Dr. Khoiron., S.AP., M.IP, Dosen Pembimbing 2: Septina Dwi Rahmawati., S.AP., M.AP

Peningkatan jumlah angka tidak sekolah Kota Malang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kedungkandang menjadi urutan pertama dengan jumlah anak tidak sekolah sebanyak 1.146 anak. Alasan tersebut yang mendasari program ini diperlukan adanya evaluasi kebijakan. Untuk menganalisis evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan dari William N. Dunn (2000) untuk menilai dengan menggunakan indikatornya yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan ini sudah dijalankan dengan baik dan dibarengi oleh program pendukung seperti bantuan beasiswa, program Ajak Anak Sekolah Kembali “AKAS”, *home visit* atau kunjungan langsung ke rumah, program vokasi dan penyediaan transportasi bus sekolah. Dengan kerjasama oleh semua pihak mulai dari pemerintah, guru, orang tua serta anak itu sendiri, maka angka putus sekolah akan berkurang dan angka partisipasi sekolah dapat meningkat.

Tantangan yang dihadapi dalam program ini meliputi kurangnya jangkauan akses pendidikan ke daerah pinggiran kota dan ekonomi keluarga. Bus sekolah dan beberapa angkutan umum tidak menjangkau ke daerah mereka. Dengan memastikan kebijakan ini tepat sasaran, diharapkan dapat mengurangi hingga tidak ada lagi anak yang tidak sekolah.

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam menurunkan angka putus sekolah di Kota Malang. Dengan adanya program pendukung dan kerjasama oleh semua pihak, maka diharapkan semua anak bersekolah hingga 12 tahun agar siap untuk memasuki dunia kerja. Meskipun terdapat tantangan dalam ekonomi keluarga sehingga anak-anak memilih untuk membantu orang tuanya, dengan strategi yang lebih keras dan tepat sasaran dapat membantu menaikkan minat untuk sekolah kembali.

KATA KUNCI: Evaluasi Kebijakan, Wajib Belajar 12 Tahun, Pendidikan

SUMMARY

Silviana, 22101091046, *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025, “Evaluation of 12-Year Compulsory Basic Education Policy in Kedungkandang District (Study at the Malang City Education and Culture Office)”*, Supervisor 1: Dr. Khoiron., S.AP., M.IP, Supervisor 2: Septina Dwi Rahmawati., S.AP., M.AP

The increasing number of out-of-school children in Malang City is a challenge in implementing the 12-year compulsory education policy. Kedungkandang ranks first with 1,146 out-of-school children. This is the reason why this program needs a policy evaluation. To analyze the evaluation of the 12-year compulsory basic education policy, this research uses the Policy Evaluation Theory of William N. Dunn (2000) to assess using its indicators which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

The method used in the research is a qualitative approach with a descriptive type, which provides an overview of the problem at hand. The purpose of this research is to evaluate the 12-year compulsory basic education policy in Kedungkandang sub-district using William N Dunn's policy evaluation theory.

The results show that this policy has been implemented well and is accompanied by supporting programs such as scholarship assistance, the Ajak Anak Sekolah Kembali “AKAS” program, home visits or direct visits to homes, vocational programs and the provision of school bus transportation. With the cooperation of all parties ranging from the government, teachers, parents and the children themselves, the dropout rate will be reduced and the school enrollment rate can increase.

Challenges faced in this program include the lack of education access to suburban areas and family economics. School buses and some public transportation do not reach their areas. By ensuring this policy is well-targeted, it is hoped that it can reduce the number of out-of-school children.

It can be concluded from this research that the education office has an important role in reducing the dropout rate in Malang City. With the existence of supporting programs and cooperation by all parties, it is expected that all children attend school for up to 12 years so that they are ready to enter the world of work. Although there are challenges in the family economy so that children choose to help their parents, with a harder and more targeted strategy, it can help increase interest in going back to school.

KEY WORDS: *Policy Evaluation, 12 Years Compulsory Education, Education*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan daerah yang disebut sentra akademis telah berupaya mengimplementasikan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga pelaksana utama di daerah. Disdikbud Kota Malang bertugas penting untuk mengupayakan agar kebijakan ini terlaksana secara menyeluruh dan inklusif di semua kecamatan, termasuk di Kecamatan Kedungkandang, yang memegang urutan pertama dengan jumlah anak tidak sekolah di Kota Malang.

Tabel 1 Urutan Kecamatan dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Kedungkandang	1.146 anak
2.	Sukun	768 anak
3.	Klojen	628 anak
4.	Lowokwaru	513 anak
5.	Blimbing	347 anak

Sumber: Radarmalang.jawapos.com, 2025

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Malang menunjukkan terdapat 1,46 persen angka putus sekolah untuk rentan umur 13-15 tahun. Sementara angka putus sekolah pada kelompok umur 19 – 24 tahun pada 2021 tercatat 40,62 %, meningkat menjadi 41,72 % pada 2022 dan pada 2023 menjadi

46,03%.¹ Menurut data tersebut, meskipun program wajib belajar 12 tahun sudah berjalan akan tetapi sampai saat ini masih mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Perlu adanya evaluasi atau penelitian lebih dalam mengenai alasan siswa putus sekolah, utamanya pada rentan usia remaja. Dari banyaknya sekolah yang ada di Kota Malang, berarti setidaknya ada satu siswa yang tidak tamat sekolah. Hal itu, perlu dikaji lebih mendalam agar para siswa memiliki motivasi belajar dan menurunkan APS di Kota Malang.

Kota Malang ternyata masih ada yang putus sekolah, argumen tersebut didukung oleh Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar belum seratus persen.² Berdasarkan Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2023, jumlah sekolah dasar di Kota Malang mencapai 320 institusi. Kota Malang masih menghadapi tantangan dalam pendidikan, terutama terkait Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar yang belum mencapai 100 persen. Penyebab terbesar masalah tersebut adalah kasus anak - anak yang tidak melanjutkan studi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus, terutama di Kecamatan Kedungkandang, untuk meningkatkan akses serta partisipasi dalam pendidikan dasar sehingga seluruh anak yang berada dalam usia sekolah dapat memperoleh kesempatan untuk belajar. Terdata per 31 Januari 2025 di Kecamatan Kedungkandang terdapat 1.146 anak, kemudian urutan kedua di Kecamatan

¹ Suryamalang.tribunnews.com. (2024). Angka Putus Sekolah di Kota Malang Meningkat. <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/03/20/angka-putus-sekolah-di-kota-malang-meningkat?page=2>. Diakses pada 3 Oktober 2024

² Radarmalang.jawapos.com. (2024). Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar Belum 100 Persen. <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/815117052/masih-ada-yang-putus-sekolah-di-malang-angka-partisipasi-murni-pendidikan-dasar-belum-100-persen>. Diakses pada 3 Oktober 2024

Sukun dengan 768 anak, Kecamatan Klojen 628 anak, Kecamatan Lowokwaru 513 anak, dan Kecamatan Klojen 347 anak. Kasus paling banyak di Kedungkandang dikarena wilayah tersebut merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak.³

Salah satu kebijakan yang menekankan pentingnya pendidikan adalah program pendidikan wajib 12 tahun yang dijalankan oleh pemangku bidang pendidikan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan dasar hingga jenjang SMA atau sederajat, tanpa terkendala oleh masalah ekonomi atau akses pendidikan. Program wajib belajar di Indonesia memiliki sejarah perkembangan cukup panjang, yang dimulai pada era kolonial Belanda hingga era kemerdekaan dan masa kini. (Sultani dan Kristanti, 2020).

Program tersebut berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 mengenai program wajib belajar 9 tahun yang disebut implementasi dari Undang – Undang Sispennas Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian tahun 2013, pemerintah pusat telah meluncurkan program wajib belajar 12 tahun atau sering dieknl sebagai program pendidikan menengah menyeluruh sebagai kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Dalam pelaksanaannya proses wajib belajar 12 tahun, masyarakat dapat mendapatkan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

³ <https://radarmalang.jawapos.com/berita-terbaru/815644217/terdata-3406-anak-di-kota-malang-tidak-sekolah>. (Diakses pada 18 Februari 2025)

Tantangan implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun masih cukup besar. Tantangan utamanya adalah angka putus sekolah yang mencapai 2,5% di jenjang SMP dan 3% di jenjang SMA pada tahun 2023 . Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang diterapkan dan realitas pada lapangan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Program wajib belajar pendidikan dasar adalah bentuk implementasi aturan pendidikan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan publik adalah tahap menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait, sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai di masyarakat. Jones (1991) dalam Subianto (2020;19) menyatakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah berkaitan dengan program yang telah disetujui, selanjutnya menentukan cara implementasinya, dan kemudian membahas para pemangku kepentingan yang terlibat dengan penekanan pada birokrasi sebagai konsep yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus upaya untuk menemukan 'apa' yang dapat dan akan dilakukan. Pemerintah sebagai aktor dalam kebijakan publik berupaya untuk mencapai tujuan demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu peran pemerintah sebagai aktor dalam hal pendidikan yakni memberikan berbagai dukungan dan seperti bantuan biaya sekolah, beasiswa dan program bantuan sosial lainnya. KIP merupakan program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi biaya pendidikan untuk siswa dari ekonomi yang kurang mampu secara sejak 2015. Namun, pada faktanya masih juga

ditemui anak – anak yang berhenti sekolah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2023 anak Indonesia yang putus sekolah dari SD hingga SMA menyentuh 29,21 % dari 30,2 juta nyawa anak dengan alasan berbagai faktor. Dari permasalahan diatas menunjukkan pendidikan di Indonesia belum merata serta programnya belum sepenuhnya tercapai.

Pendidikan adalah proses mengubah menjadikan manusia menjadi lebih baik, yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk membantu setiap individu mengembangkan potensi agar dapat berkontribusi secara positif pada individu maupun masyarakat. Hal ini tidak selalu mengenai belajar di sekolah atau mendapatkan gelar, tetapi juga mengenai pembentukan karakter, pemahaman dunia, dan kemampuan untuk berpikir kritis, beradaptasi, serta menghadapi tantangan. Pendidikan mencakup pembelajaran sepanjang masa, baik secara formal maupun informal, di mana setiap pengalaman bisa menjadi kesempatan untuk belajar.

Sebagai suatu proses, pendidikan mengupayakan perubahan dalam sikap dan perilaku individu atau kelompok untuk mematangkan kepribadian mereka melalui kegiatan instruksional dan pelatihan, yang meliputi tindakan, metode pendidikan (Hidayat dkk, 2019; 23). Pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan kesadaran serta direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menjadi lebih aktif..⁴

⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan yang baik dan berkualitas sangat penting untuk pengembangan sikap dan pikiran setiap manusia di dunia. Hal ini juga ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI dinyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”.

Dengan demikian, pendidikan berperan dalam membentuk karakter, sikap, serta keterampilan individu agar mampu berkontribusi secara positif bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran formal di kelas, tetapi juga melibatkan latihan dan pengalaman yang membantu proses pendewasaan. Dengan pendidikan yang baik, individu diharapkan mampu mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan moral, yang semuanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan tujuan negara, yakni meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Upaya dan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat dilihat melalui penerbitan beragam regulasi. Salah satu regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah adalah program pendidikan wajib. Penyusunan program ini hendaknya bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan - kegiatan operasional. Program tersebut tidak hanya mencakup tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan jelas, tetapi juga terperinci menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang dibutuhkan, SOP kerja yang harus diikuti, dan standar yang menjadi pedoman. (Tachjan, 2015).

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti, seharusnya melalui program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun tersebut, dapat menekan angka kenaikan putus sekolah dan angka partisipasi murni. Namun, pada kenyataannya masih terus meningkat setiap tahunnya. Jadi, dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti dapat memahami apakah program wajib belajar ini perlu diidentifikasi dan dievaluasi dalam implementasi kebijakannya agar dapat diketahui penyebab utama dari naiknya angka putus sekolah di Kota Malang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi sebuah rujukan penting bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, karena dapat menambah landasan teori yang dibutuhkan pada proses analisis. Meskipun tidak ditemukan penelitian terdahulu dengan kesamaan judul yang identik dengan penelitian ini, tetapi memiliki keterkaitan topik. Oleh karena itu, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tema sejenis tetap dijadikan dasar dalam mendukung penelitian ini (Randi, 2018; 15).

Sebagai dasar pertimbangan sekaligus rujukan agar penelitian ini dapat dibandingkan serta melengkapi kajian lain yang membahas topik serupa, maka penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi pembandingan, pendukung, dan pelengkap dalam menganalisis persamaan maupun perbedaan penelitian ini dengan studi terdahulu.

Peneliti menjadikan studi-studi sebelumnya sebagai patokan dalam menyusun dan mengkaji penelitian ini. Penelusuran terhadap berbagai literatur

terkait dilakukan guna menemukan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi, baik dalam hal kesamaan maupun perbedaan, terhadap isu yang akan dibahas. Adapun topik utama yang diangkat oleh peneliti adalah evaluasi kebijakan wajib belajar 12 tahun pada jenjang pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Kedungkandang, dengan fokus utama pada aspek evaluasi kebijakannya. Melalui telaah terhadap sejumlah karya ilmiah terdahulu, peneliti mengkaji temuan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

Sebelum menjadi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, pemerintah telah menjalankan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, ini mencakup dari 6 tahun ditingkat sekolah dasar dan 3 tahun pada tingkah sekolah menengah atas. Aturan tersebut terkandung dalam Undang – undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini didukung dengan penelitian oleh Hidayat, Khoiron, dan Retno Wulan pada tahun 2023 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian pendidikan oleh pemerintah daerah Lumajang yang rata-rata hanya tamat sampai Sekolah Dasar. Jadi, program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi program lanjutan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dengan membandingkan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan.

Penelitian pertama yang dilakukan Dzakiyah A.P di tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Dinas Pendidikan

Kota Bekasi”. Studi ini mengevaluasi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menggunakan pendekatan change model yang menekankan pada pentingnya intervensi untuk mencapai tujuan program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti perencanaan anggaran daerah (APBD) yang terbatas, kekurangan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik, serta minimnya alokasi dana untuk bantuan pendidikan.

Kedua, penelitian oleh Yuliawati pada tahun 2022 dengan penelitian dengan judul “Wajib Belajar 12 Tahun dalam Realita di Wilayah Kabupaten Bogor” bertujuan untuk memetakan akses pendidikan secara umum di Kabupaten Bogor, serta mengetahui daya dukung pemangku kepentingan tentang fasilitas pendidikan. Pada penelitian ini membahas kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap rendahnya pendidikan. Selain itu tidak meratanya akses pendidikan disetiap wilayah, kultur dan budaya yang belum terjangkau dengan teknologi digital.

Ketiga oleh Fitri Silvia dan Aris Riswandi Sanusi ditahun 2023. Yang melakukan penelitian dengan judul “Pentingnya Wajar Diknas 12 Tahun Untuk Menyongsong Indonesia Emas” yang membahas pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan generasi emas melalui pemberian kemampuan yang relevan kepada para peserta didik. Tujuan dari penelitian ini untuk menyosialisasikan kembali tentang pentingnya merealisasikan Wajar Diknas 12 Tahun untuk mendukung Indonesia Emas Tahun 2045.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa program wajib belajar 12 tahun memiliki tantangan tergantung daerah masing – masing. Penelitian Fitri Silvia dan Aris Riswandi Sanusi berfokus pada pentingnya kebijakan ini dalam memberikan bekal kompetensi kepada peserta didik, tetapi penelitian Yuliawati mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah, akses pendidikan tidak merata, serta faktor budaya dan teknologi yang belum mendukung di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bogor. Penelitian Dzakiyah A.P di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kendala dalam implementasi kebijakan ini terletak pada aspek perencanaan anggaran, keterbatasan fasilitas, serta minimnya dana bantuan pendidikan. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan Wajib Diknas 12 tahun memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya memerlukan perbaikan dalam hal infrastruktur, dukungan finansial, dan kesadaran masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. penelitian ini disusun dengan merujuk pada sejumlah studi sebelumnya yang telah dibahas. Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek pembahasan. Fokus utama penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan, yang menjadi pembeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari variabel yang digunakan serta teori yang dijadikan landasan, yang tidak sama dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Perbedaan sebelumnya dengan penelitian ini yaitu di perbedaan lokasi, dan menggunakan teori masing – masing oleh peneliti. Adapun penelitian yang pertama oleh Dzakiyah A.P (2019) menggunakan model evaluasi *change model*,

kemudian pada penelitian Yuliawati (2022) menggunakan temuan lapangan dari studi pustaka yaitu mencari atau menemukan data dari berbagai sumber yang relevan, bisa berupa buku, jurnal, dan riset yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya pada penelitian ketiga oleh Fitri Silvia & Sanusi (2023) berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Dengan menggunakan penelitian terdahulu dan teori tersebut sebagai bahan acuan, maka peneliti menemukan sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah dibawah ini.

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas yang dijelaskan oleh penulis, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu “bagaimana evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang dengan menggunakan indikator evaluasi William N. Dunn yang terdiri dari: a) efektivitas, b) efisien. c) kecukupan, d) perataan, e) responsivitas, dan f) ketepatan?”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

- a) Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis efektivitas dari kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang telah tercapai.

- b) Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang.
- c) Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis seberapa jauh pencapaian hasil atau kecukupan yang diinginkan untuk memecahkan masalah pada kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang.
- d) Mengetahui dan mendeskripsikan perataan antara biaya dan manfaat kepada kelompok yang berbeda dari kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang.
- e) Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hasil kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok tertentu dalam memperoleh responsivitasnya.
- f) Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis menghasilkan ketetapan hasil (tujuan) kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang benar – benar berguna atau bernilai.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak positif atau kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian terhadap berbagai pihak. Manfaat penelitian dapat berupa sumbangan teori, praktis, atau sosial yang diberikan bagi peneliti, masyarakat, pemerintah, atau instansi terkait. Dengan mengacu pada

latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan tujuan penelitian, adapun manfaat ini diuraikan secara terperinci adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis dan pengetahuan, penulis berharap dapat bermanfaat dalam hal memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kota Malang, khususnya yang berkaitan dengan bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Secara penerapan dalam kehidupan sehari - hari, peneliti memberi masukan positif kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang terkait strategi dan langkah – langkah yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di daerah Kecamatan Kedungkandang.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan akan menjadi salah satu pedoman dalam penulisan proposal penelitian ini. Sehingga notasi sistematikanya menjadi:

a) BAB I : PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, penelitian terdahulu, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

b) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II memuat teori – teori tentang penelitian yang berasal dari berbagai *literature* dalam buku, *e – book*, jurnal, dan *e – journal*.

c) BAB III : METODE PENELITIAN

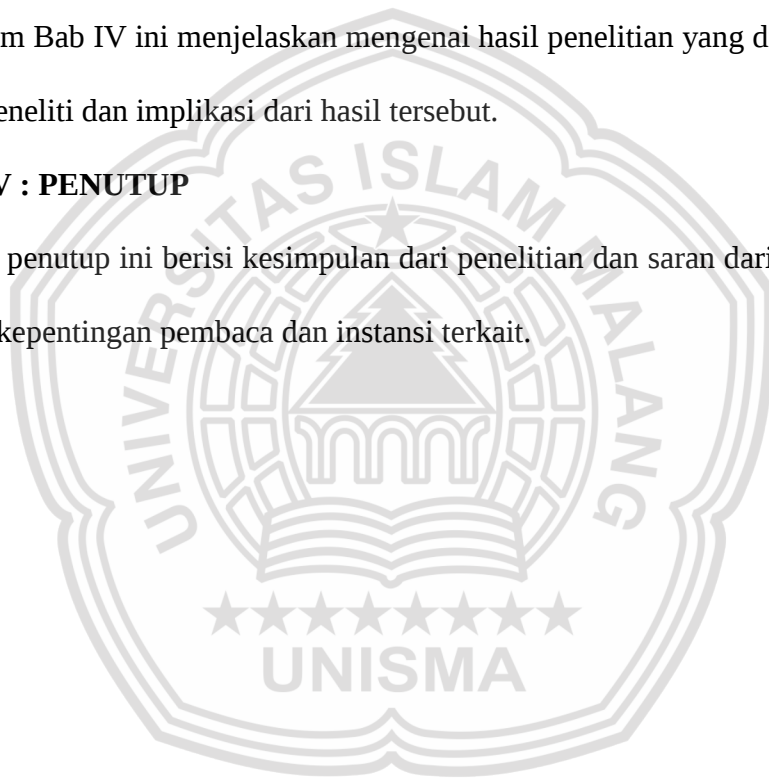
Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. Didalam metode penelitian diuraikan lebih lanjut mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data atau validasi data.

d) BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab IV ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan implikasi dari hasil tersebut.

e) BAB V : PENUTUP

Bab V penutup ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran dari peneliti untuk kepentingan pembaca dan instansi terkait.



BAB VII

PENUTUP

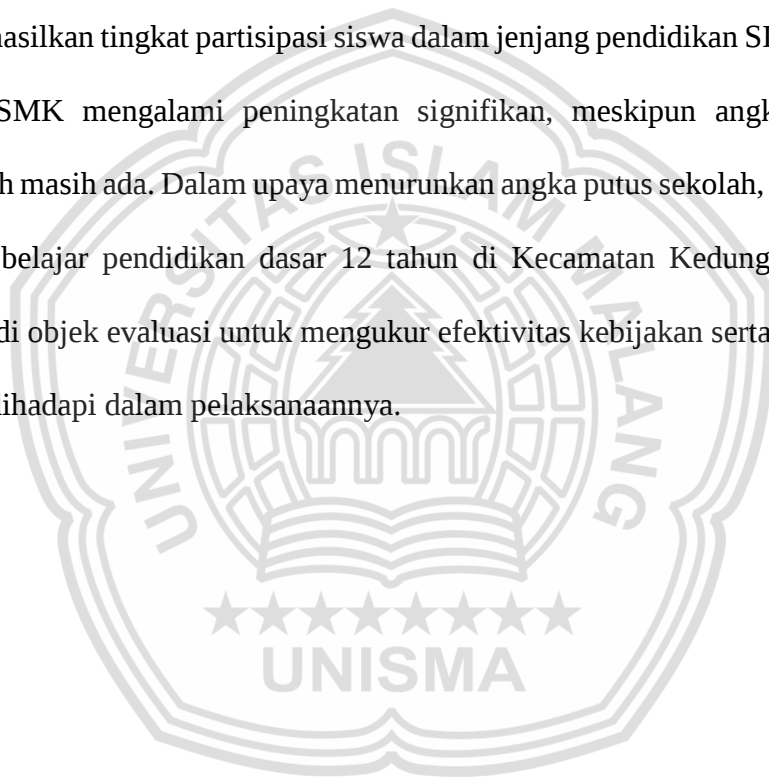
A. Kesimpulan

a) Menurunkan Angka Putus Sekolah

Berdasarkan hasil analisis terkait evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dalam tahun ini sudah mengalami penurunan pada anak putus sekolah. Hal ini dilihat dari pengukuran efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Serta dibuktikan secara efektivitas angka putus sekolah berhasil turun sebanyak lima persen jika dilihat berdasarkan efektivitasnya. Akan tetapi pencapaian dalam akses transportasi di beberapa wilayah masih belum tercapai. Berdasarkan efisiensi, sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan berupa tenaga pendidik, bantuan finansial atau beasiswa, dan fasilitas pendidikan sudah efektif. Pemerintah telah berupaya menambah anggaran untuk pendidikan dan berupaya strategis dengan program tambahan yang melibatkan orang tua. Sedangkan kecukupan mengenai masalah yang dihadapi penyebab putus sekolah paling banyak adalah faktor ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya memberikan bantuan beasiswa dan program mengajak kembali anak sekolah atau 'AKAS'. Dari pemerataan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seperti akses pendidikan dan bantuan yang melum menjangkau ke semua daerah karena pemberian beasiswa bersyarat. Sedangkan dari responsivitasnya, 80% masyarakat sudah cukup puas dengan adanya bantuan pendidikan, akan tetapi terdapat tantangan pada kurang meratanya akses ke sekolah. Kemudian ketepatan

atau manfaat yang dihasilkan sudah efektif, hal ini dibuktikan mengenai pemberian seragam gratis dan pengadaan program penjurusan untuk bekal siswa menciptakan lapangan kerja sendiri.

Dengan adanya kebijakan program lanjutan dari wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun ini, masyarakat menjadi lebih sadar mengenai pentingnya pendidikan untuk anak – anaknya. Kebijakan ini menghasilkan tingkat partisipasi siswa dalam jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK mengalami peningkatan signifikan, meskipun angka putus sekolah masih ada. Dalam upaya menurunkan angka putus sekolah, program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kecamatan Kedungkandang menjadi objek evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Salim. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Raja Grafindon Persada.
- Abdoellah, & Rusfiana Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan*. Malang: Empatdua Media
- Ahmad, Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat & Abdilllah. (2019). *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 17.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
- Ramli, Muhammad. (2022). *Electronic Government Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya. Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Syafii, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tersiana, Andra. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia

Jurnal atau Skripsi:

Akibu, Rifka S. (2019). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Akibu, R. S. (2019). Evaluasi Kebijakan KAKibu, R. S. (2019). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Akibu, R. S. (2019). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pen, 2(1), 8–14.*

Diana, Ayu Vira., Afifuddin, & Septina, D.R. (2023). Implementasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Junrejo Kota Batu (Studi pada UD Siti Tas). Malang. Universitas Islam Malang: *Jurnal Respon Publik, 17(7), 28–37.*

Hidayat, Mahmud., Khoiron, & Septina, D.R. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. *Jurnal Respon Publik, 17(8), 47–57.*

Putu, Ni., Sanjiwani, O., & Septina, D.R. (2024). *Evaluasi Program Parkir Elektronik (E-Parking) Di Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD) Kota Malang . Universitas Islam Malang. 18(9), 35–47.*

Setiyawan. (2013). Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Jakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.*

Sofyan & Sanusi (2023). Pentingnya Wajar Dikdas 12 Tahun Untuk Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2022. Aceh. *Jurnal UBP Karawang, 2411–2420.*

Waruwu, M. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 99–113.* <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>

Yuliwati, Yuliawati. (2022). Wajib Belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 10(2), 110–118.* <https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>

Website:

Nanda. (2024). Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Belum 100 Persen. Malang. Radarmalang.jawapos.com. URL: <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/815117052/masih-ada-yang-putus-sekolah-di-malang-angka-partisipasi-murni-pendidikan-dasar-belum-100-persen> . Diakses pada 3 Oktober 2024.

- Indo, Benni. (2024). Angka Putus Sekolah di Kota Malang Meningkat. Malang. Suryamalang.tribunnews.com. URL: <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/03/20/angka-putus-sekolah-di-kota-malang-meningkat?page=2>. Diakses pada 3 Oktober 2024.
- Putra. (2025). *Terdata 3.406 Anak di Kota Malang Tidak Sekolah - Radar Malang*. Terdata 3.406 Anak Di Kota Malang Tidak Sekolah - Radar Malang; Radar Malang. <https://radarmalang.jawapos.com/berita-terbaru/815644217/terdata-3406-anak-di-kota-malang-tidak-sekolah>

